

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. *Signalling Theory* (Teori Sinyal)

Teori sinyal menurut Brigham dan Houston (1999) pada penelitian yang dilakukan oleh Fenandar (2012) adalah tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik atau (*prinsipal*). Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat mempunyai keinginan untuk menunjukan sinyal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan sinyal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian internal, pengungkapan yang lebih lengkap dan transparan. Pemerintah daerah menunjukan laporan keuangan kepada masyarakat untuk menunjukan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat masyarakat dengan baik (Puspita dkk, 2010).

Menurut Artana (2016) *signalling theory* digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah dan rakyat selaku pihak pemberi amanah dan adanya pihak ketiga selaku auditor laporan keuangan yang mengaudit laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan sehingga mampu dipercaya oleh masyarakat selaku pemberi amanah.

### **2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut (Afiah, 2009) pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
  - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
  3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
  4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah tersebut, ketepatanwaktuan dan keterandalan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatanwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid ( Zuliarti, 2012 ).

### **2.1.3. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah**

Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses atau praktik. Menyadari tidak semua pemangku kepentingan dapat memahami akuntansi dan laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menggunakan informasi keuangan maka diperlukan teknik untuk menganalisis laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 71 tahun 2010 yaitu: “Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Untuk lebih memahami akuntansi sektor publik secara komprehensif perlu diketahui sistem dan prosedur akuntansi, standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta memahami komponen-komponen laporan keuangan yang harus dihasilkan oleh setiap entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan (Nazaruddin dkk, 2014).

#### **2.1.4. Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu: “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 menyatakan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atau risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut., baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Penaksiran risiko mencakup:

- a. Identifikasi Risiko. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
  - b. Analisis Risiko. Menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.
3. Kegiatan Pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko .
  4. Informasi dan Komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non

keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Hal-hal yang perlu di perhatikan dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Instansi Pemerintah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif, berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman, video, e-mail, dan arahan lisan.
  - b. Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalianintern.
5. Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam

pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut.

#### **2.1.5. Pemanfaatan Sistem informasi Akuntansi**

Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah :“Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah”. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup :

1. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten ,dan kota,
2. Neraca daerah,
3. Laporan arus kas,
4. Catatan atas laporan keuangan daerah,
5. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

6. Laporan keuangan perusahaan daerah,

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Penyusunan standar informasi keuangan daerah,
2. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat,
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi,
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD,
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD,
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi,
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah di daerahnya masing-masing dengan tujuan untuk:

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah,
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah,
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah,
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah,
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat,
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Pnelitian
1	Parananda (2016)	Pengaruh pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) pada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan	<p>Pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah</p> <p>Tingkat pendidikan ahir tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah</p> <p>Lama masa kerja staf keuangan pemda tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah</p>
2	Oktavia dkk (2015)	Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pemahaman SAP akrual terhadap penyusunan laporan keuangan pada pemerintah kota Banjarmasin	<p>Pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan</p> <p>Pelatihan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan,</p> <p>Pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.</p>
3	Yensi dkk (2014)	Pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal (internal audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)	<p>kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>pengendalian intern tidak pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan</p>

4	Kasim (2015)	Pengaruh kompetensi akuntan publik dan penerapan dalam pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Kompetensi akuntan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
5	Sari dkk (2014)	Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada dinas-dinas di pemerintahan kabupaten jembrana)	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.  Secara simultan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6	Susilawati & Riana (2014)	Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Secara simultan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.  Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
7	Diani (2014)	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di kota pariaman).	Pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  Peran internal audit berpengaruh positif signifikan

			terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	Yuliani dkk (2010)	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan perang internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	<p>Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota</p> <p>Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p> <p>Peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan</p>

### 2.3. Kerangka Pemikiran

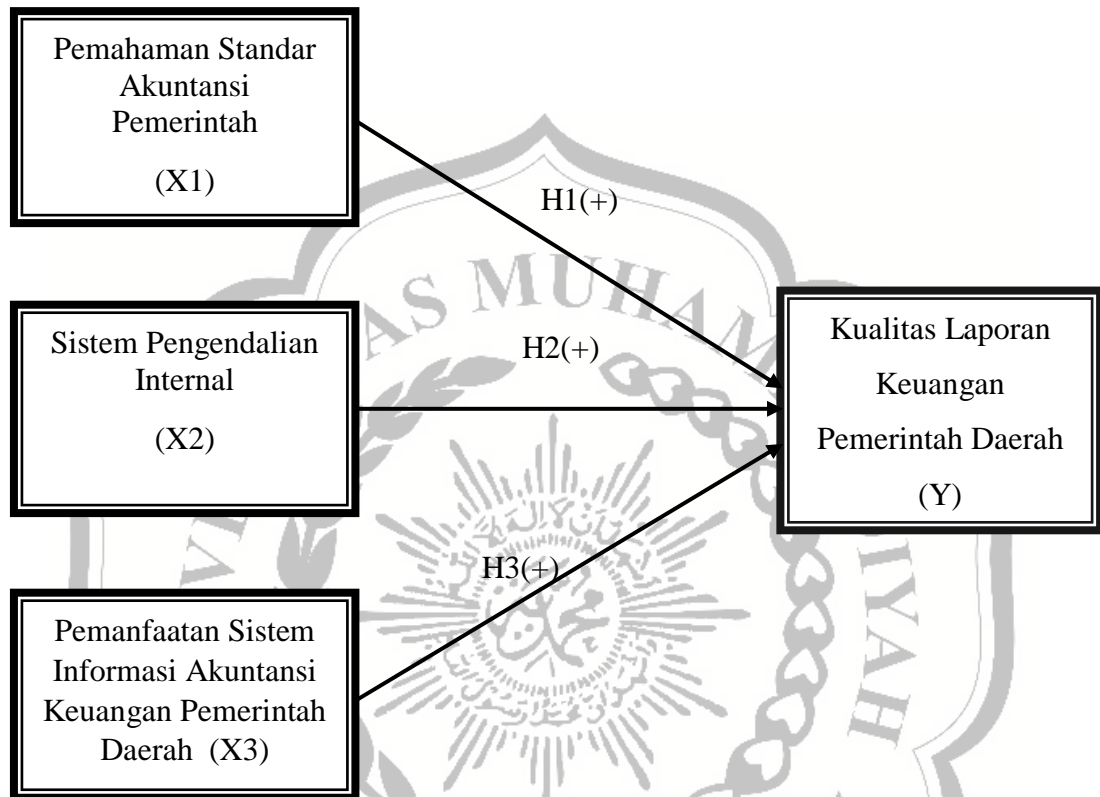
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen pemahaman standar akuntansi pemerintah, pengendalian internal dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik sangat penting bagi semua entitas termasuk pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang menyusun laporan dengan baik sesuai prinsip pelaporan akuntansi pemerintahan akan membuat para pengguna laporan keuangan tersebut akan menilai kinerja para pegawai di pemerintahan daerah bekerja secara maksimal. Kualitas laporan keuangan yang baik akan memudahkan pembaca memahami informasi yang ada dalam laporan tersebut.

Menurut Sari dkk (2014) jika pegawai pengelola keuangan semakin paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Asumsi *signalling theory* yang memosisikan pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah yang berusaha menunjukkan adanya sinyal kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah. Dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas agar kinerja pemerintah dianggap maksimal oleh masyarakat.

Pemerintah daerah harus mendisain, mengoprasikan dan memelihara sistem pengendalian internal yang baik dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan (Fajrin, 2015). Hal ini berbanding lurus dengan asumsi teori sinyal yang berusaha memberikan sinyal kepada pemberi amanah yang dalam hal ini adalah masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas, agar masyarakat menganggap kinerja pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah memiliki kinerja yang baik.

Memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dengan baik maka akan meningkatkan kinerja serta menghasilkan hasil yang baik pula, yakni berupa laporan keuangan yang berkualitas (Sari dkk, 2014). Sejalan dengan *signalling theory* yang menyatakan bahwa pihak pemerintah yang diberikan amanah oleh masyarakat berusaha untuk memberikan sinyal yang baik dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, agar kinerja pemerintah dianggap baik.

Gambar 2.1  
Bagan Kerangka Pemikiran



## 2.4. Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pemahaman merupakan kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan andal sehingga

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tentunya laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas (Sari dkk, 2014). Sejalan dengan *signalling theory* yang dalam hal ini berusaha untuk menyampaikan sinyal berupa laporan keuangan yang berkualitas agar kinerja pemerintahan dianggap baik oleh pemberi amanah (masyarakat).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2014) menyatakan pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Jembrana yang didukung oleh penelitian Oktavia dkk (2015) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan SAP berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Berdasar hasil penelitian tersebut diperkirakan terdapat pengaruh positif diantara variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah akuntansi dengan variabel kualitas laporan keuangan, maka penulis mengajukan hipotesis.

H<sub>1</sub>: Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **2.4.2. Pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Warren dkk (2005) pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati & Riana (2014) salah satunya adalah

untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*) yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sendiri memiliki sistem SIMDA yang memiliki fungsi salah satunya sebagai alat pengendali internal pemerintah daerah karena dengan penerapan sistem tersebut maka semua data administrasi keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas akan tercatat secara elektronik dan tersistemasi sehingga mengurangi kemungkinan-kemungkinan penyelewengan dana. Hal ini didukung dengan asumsi *signalling theory* yang mengasumsikan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah berusaha menyampaikan sinyal kepada masyarakat berupa laporan keuangan yang berkualitas, agar kinerja pemerintah dinilai baik oleh masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah.

Penelitian terdahulu diantaranya, Diani (2014) yang menyimpulkan bahwa peran internal audit sebagai pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ditambah dengan hasil penelitian Kasim (2015) Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan. Berdasar hasil penelitian tersebut diperkirakan terdapat pengaruh positif diantara variabel pengendalian internal dengan variabel kualitas laporan keuangan, maka penulis mengajukan hipotesis.

H<sub>2</sub>: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

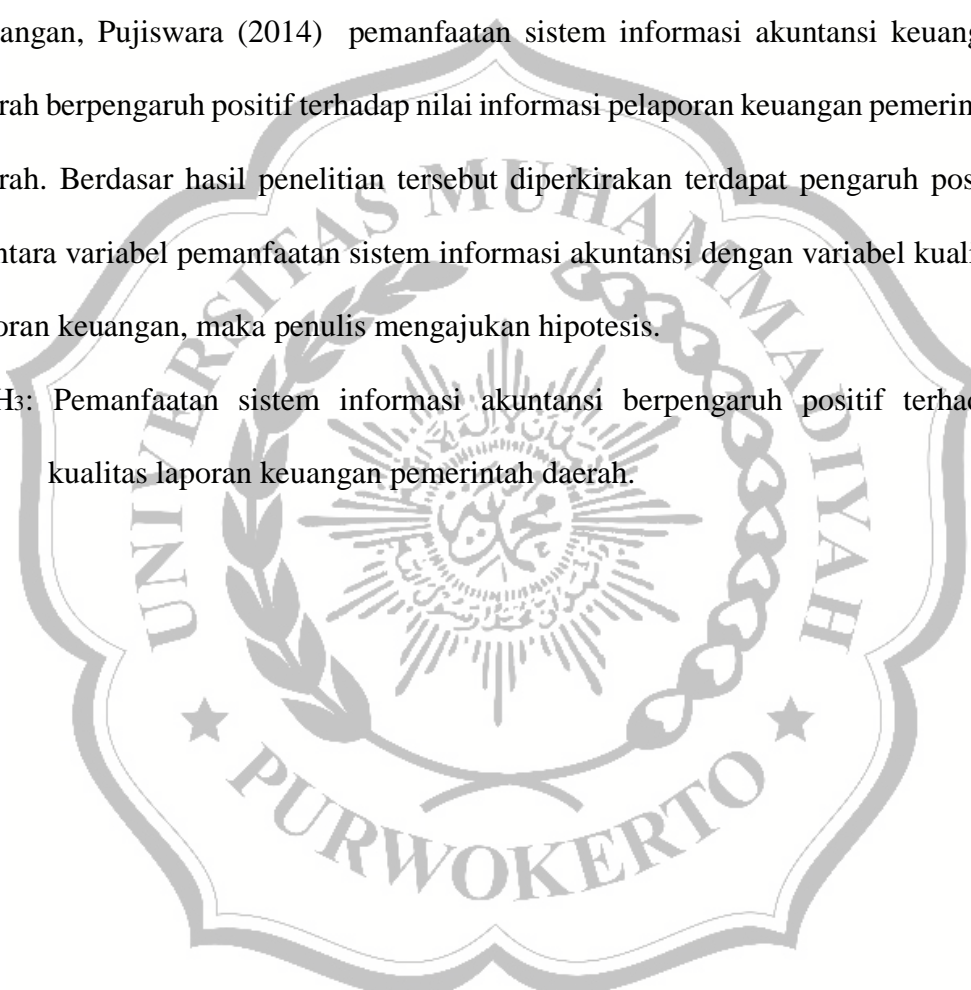
#### **2.4.3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Penerapan sistem keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sistem SIMDA juga membantu proses penyusunan laporan keuangan, semua proses administrasi keuangan tercatat dengan sistem SIMDA. Hal tersebut tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan fakta yang ada karena semua kegiatan keuangan tercatat di sistem tersebut. Didukung dengan *Signalling theory* yang bisa diasumsikan bahwa pemerintah berupaya memberikan sinyal kepada masyarakat adanya kinerja

pemerintahan yang baik dengan memberikan laporan keuangan yang berkualitas yang disusun oleh pemerintah daerah.

Sari dkk (2014) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Pujiswara (2014) pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasar hasil penelitian tersebut diperkirakan terdapat pengaruh positif diantara variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan variabel kualitas laporan keuangan, maka penulis mengajukan hipotesis.

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



## 2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis, sifat yang sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat ( Soeratno dan Arsyad, 1993 ).

**H<sub>1</sub>**: Pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>2</sub>**: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>3</sub>**: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

